

ABSTRAK

Annisa Mahfuzah, S.E.I.: *Efektivitas Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan di Kalimantan Selatan (Studi Kasus di Kabupaten Tabalong)* di bawah bimbingan I: Dr. H. Sukarni, M. Ag. dan II: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2018).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya eksploitasi lahan di Indonesia khususnya Kalimantan Selatan yang kaya akan hasil tambang. Kekayaan yang melimpah tersebut seharusnya untuk kesejahteraan dan *ke-mashlahat-an* umat sebagaimana tujuan yang tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Namun yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan di Kalimantan Selatan. Selain itu untuk mengetahui bentuk sosialisasi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam sosialisasi fatwa tersebut serta upaya penyelesaian yang ditempuh MUI.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis empiris, yaitu penelitian dilakukan di lingkungan tertentu, dalam hal ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan (studi kasus di Kabupaten Tabalong) dengan pendekatan kualitatif. Ada empat orang yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini, yaitu pihak MUI Kabupaten Tabalong, Dinas Lingkungan Hidup, Pelaku pertambangan serta masyarakat yang berada di sekitar lokasi penambangan. Para informan diwawancarai dengan cara *purposive sampling* yang hasilnya akan dikomparasi dan dieksplorasi kemudian ditarik kesimpulan analisis yang konkrit. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif serta menggunakan model analisis Spradley.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa tersebut tidak efektif. Ketidakefektifan fatwa tersebut terlihat dari ketidaksesuaian hasil yang diharapkan. Di mana masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak mengetahui fatwa tersebut dan tujuan yang termuat di dalam fatwa yaitu untuk kesejahteraan dan *ke-mashlahat-an* tidak tercapai karena adanya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi yaitu kendala dikepengurusan MUI Daerah Kabupaten Tabalong, baik dari segi SDM maupun pendanaan dalam sosialisasi. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dan pelaku pertambangan juga menjadi kendala, ditambah dengan minimnya peran tokoh agama dalam mendukung proses sosialisasi. Berdasarkan analisis model Spradley menunjukkan bahwa ketaatan dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan aturan sesuai dengan ajaran agama dipengaruhi oleh budaya masyarakat Kabupaten Tabalong yang mempunyai cara pandang antroposentrisme terhadap lingkungan serta motif ekonomi yang menjadi prioritas. Sehingga fatwa ini tidak akan efektif meskipun adanya sosialisasi maupun penerapan sanksi terhadap pelanggar aturan tanpa adanya kesadaran dan ketaatan oleh individu itu sendiri.

Kata Kunci: Efektivitas, Pertambangan Ramah Lingkungan, Kabupaten Tabalong.

ABSTRACT

Annisa Mahfuzah, SEI: *Effectiveness of MUI Fatwa Number 22 Year 2011 on Environmentally Friendly Mining in South Kalimantan (Case Study in Tabalong District)* under the guidance of I: Dr. H. Sukarni, M. Ag. and II: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., On PostGraduate Program of UIN Antasari Banjarmasin, (2018).

This research is motivated by the rampant exploitation of land in Indonesia, especially South Kalimantan which is rich in mining products. The abundant wealth should be for the welfare and *mashlahat* of the people as stated in the MUI Fatwa Number 22 Year 2011 About on Environmentally Friendly Mining. However, what happens in the field shows that mining activities have negative impacts on the environment.

This study aims to determine the effectiveness of MUI Fatwa Number 22 Year 2011 About Environmentally Friendly Mining in South Kalimantan. In addition to knowing the form of socialization and the constraints faced in the socialization of the fatwa as well as efforts to solve the MUI.

This research includes empirical sociological law research, ie research conducted in certain environments, in this case done in South Kalimantan Province (case study in Tabalong District) with qualitative approach. There are four people who become *key informants* in this research, namely the MUI Tabalong District, Environment Agency, Mining Actors and the communities around the mining site. The informants were interviewed by *purposive sampling* which results will be comparable and explored and then draw conclusions of concrete analysis. Analysis is done descriptively qualitative and using Spradley model analysis.

The results show that the fatwa is not effective. The ineffectiveness of the fatwa is evident from the expected non-conformity of the results. Where there are still many people who do not know the fatwa and the goals contained in the fatwa that is for welfare and *mashlahat* not achieved because of the economic inequality in society. The obstacles faced are the constraints stewardship of MUI Tabalong District, both in terms of human resources and funding in socialization. Lack of awareness and legal compliance of the community and mining actors is also a constraint, coupled with the lack of role of religious leaders in supporting the socialization process. Based on the Spradley model analysis shows that the obedience and awareness of the people in running the rules in accordance with the teachings of religion is influenced by the culture of the people of Tabalong Regency who have an perspective anthroposentrisme way towards the environment as well as the priority economic motives. So that this fatwa will not be effective despite the socialization and application of sanctions against violators of the rules without any awareness and adherence by Individu itself.

Keywords: Effectiveness, Environmentally Friendly Mining, Tabalong District.